

## BAB II

### KERANGKA KONSEPTUAL

#### 2.1 Studi Terdahulu

Pada bab ini, penulis akan menjelaskan beberapa referensi yang kemudian penulis gunakan sebagai studi terdahulu dalam penelitian penulis. Masing – masing studi terdahulu memiliki kontribusi dalam penelitian ini. Studi terdahulu pertama yang digunakan penulis adalah jurnal berjudul *After Indonesia's Ratification: The ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution and Its Effectiveness As A Regional Environmental Governance Tool*, yang ditulis oleh Daniel Heilmann pada tahun 2015.<sup>1</sup> Jurnal ini membahas tentang salah satu rezim internasional yang ada di regional Asia Tenggara dibawah naungan ASEAN yang disebut sebagai *Transboundary Haze Pollution Agreement* (THPA). Menariknya Heilmann juga menyinggung bagaimana Indonesia sebagai negara berdaulat kemudian kebijakan luar negerinya dapat dipengaruhi oleh kondisi internasional.

Indonesia yang awalnya tidak ingin meratifikasi *ASEAN Transboundary Haze Pollution Agreement*, pada 20 Januari 2015 memutuskan untuk meratifikasi kesepakatan tersebut. Heilmann menuliskan bahwa Indonesia mendapat tekanan dari negara lain di kawasan Asia Tenggara.<sup>2</sup> Sebelum mengidentifikasi dan menyimpulkan terkait akhirnya Indonesia meratifikasi, jurnal ini juga menjelaskan ASEAN THPA secara mendetail. Mulai dari kerangka kerjasamanya,

---

<sup>1</sup> Heilmann, Daniel. 2015. *After Indonesia's Ratification: The ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution and Its Effectiveness As a Regional Environmental Governance Tool*, in: *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 34, 3, 95–121.

<sup>2</sup> *Ibid*, hal. 16

aturan yang digunakan, keanggotaan dan kondisi kawasan terkait polusi lintas batas di kawasan ASEAN. Sesuai dengan tujuan penelitiannya, Heilmann juga ingin melihat seberapa efektif THPA itu sendiri. Baru kemudian Heilmann menjelaskan bagaimana Indonesia menjadi negara terakhir yang meratifikasi perjanjian ini.<sup>3</sup> Pada dasarnya pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan dari level yang lebih tinggi yaitu rezim Internasional itu sendiri, kemudian menganalisis bagaimana tekanan Internasional yang kuat mempengaruhi kebijakan pemerintah Indonesia. Tidak berhenti sampai disana, Heilmann juga menjelaskan bagaimana kondisi THPA pasca Indonesia meratifikasi perjanjian tersebut.<sup>4</sup>

Persamaan penelitian milik Heilmann dengan penulis adalah terkait kebijakan Indonesia dalam meratifikasi perjanjian internasional. Sehingga penulisan Heilmann ini berkontribusi pada penelitian penulis dalam melihat bagaimana kebijakan luar negeri Indonesia dapat dipengaruhi oleh sistem internasional. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian, konsep, dan juga perjanjian yang diratifikasi. Jurnal yang dituliskan oleh Heilmann memiliki fokus yang cukup banyak, sedangkan penelitian penulis memiliki satu fokus yaitu melihat faktor determinan dari kebijakan pemerintah Indonesia dalam penandatanganan CPOPC bersama Malaysia. Karena perbedaan fokus itu pula, konsep yang digunakan juga berbeda. Heilmann terlihat lebih *general* dengan menggunakan pendekatan dari level regional kemudian dianalisis kenapa akhirnya Indonesia meratifikasi THPA. Sedangkan penulis ingin melihat lebih komprehensif

---

<sup>3</sup> *Ibid*,

<sup>4</sup> *Ibid*,

dibantu dengan konsep *determinant of foreign policy* milik Coplin yang dikerucutkan pada *international circumstances factor*.

Studi terdahulu kedua yang penulis gunakan adalah penelitian yang ditulis oleh Iisgindarsah pada tahun 2012 dengan judul *Indonesia's Democratic Politics and Foreign Policy-Making: A Case Study of Iranian Nuclear Issues, 2007 – 2008*.<sup>5</sup> Iisgindarsih berangkat dari kebijakan pemerintah Indonesia yang memilih abstain dalam *voting* terhadap pemberian sanksi Internasional di Resolusi *UN Security Council* No.1803 padahal sebelumnya sikap Indonesia adalah menyetujui pemberian sanksi tersebut. Sanksi yang diberikan UNSC kepada Iran adalah terkait isu pengembangan nuklir oleh Iran.

Dalam melihat sikap pemerintah Indonesia ini, Iisgindarsih menggunakan konsep faktor determinan dalam pembuatan kebijakan luar negeri. Yang pertama adalah penentuan aktor domestik. Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara politik domestik Indonesia dengan politik luar negerinya kali ini. Termasuk dari sisi *decision-maker* atau aktor kunci pembuat kebijakan. Kemudian dilihat pula sikap aktor kunci tersebut dengan melihat pengaruh dari aktor lain seperti partisan, birokrasi, kepentingan, dan juga pengaruh massa. Melihat pengaruh aktor ini, Iisgindarsih menyajikan data yang cukup komperhensif. Misalnya dalam melihat bagaimana sikap masing – masing partai politik terhadap kebijakan yang akan diambil terkait isu nuklir Iran.

Temuan Iisgindarsih dalam penelitiannya ini adalah lembaga eksekutif Indonesia dalam hal ini Presiden sebagai aktor kunci, namun banyak aktor lain

---

<sup>5</sup> Iisgindarsah. 2012. *Indonesia's Democratic Politics and Foreign Policy-Making: A Case Study of Iranian Nuclear Issues*,– 2008. S. Rajaratnam School of International Studies.

yang dapat mempengaruhi kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah Indonesia. Iisgindarsih juga menemukan bahwa sebenarnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sendiri merasa sedang berada di kondisi atau keadaan yang sulit.<sup>6</sup> Yang berkaitan dengan keputusan Indonesia dalam voting sanksi atas aktivitas nuklir Iran. Kemudian menjadi pertimbangan bagi aktor utama untuk memutuskan kebijakan luar negeri. Selanjutnya, kondisi domestik sangat berpengaruh bagi setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Termasuk tekanan dari kelompok kepentingan dan kelompok masyarakat.<sup>7</sup>

Kontribusi tulisan ini dalam penelitian penulis adalah membantu penulis dalam mengoperasionalkan konsep *determinan of foreign policy* dalam sebuah studi kasus. Selain memiliki persamaan konsep, tulisan ini juga memiliki level analisis yang sama dengan penulis, yaitu pada *level of analysis* negara. Perbedaan antara tulisan ini dengan penulis adalah terkait isu yang diteliti. Iisgindarsih mengambil fenomena yang sangat *maskulin* yaitu terkait pemberian *sanksi* dari PBB kepada negara Iran atas aktivitas nuklirnya. Sedangkan penulis lebih kepada fenomena ekonomi yang kemudian menghebohkan dunia ekonomi, yaitu inisiasi CPOPC oleh pemerintah Indonesia.

Untuk mempermudah melihat *research position* penulis atas ketiga studi terdahulu yang digunakan penulis dalam penelitian ini, penulis membuat tabel perbandingan studi terdahulu seperti berikut:

---

<sup>6</sup> *Ibid.* Hal. 4

<sup>7</sup> *Ibid.*

**Tabel 2.1 Perbandingan Studi Terdahulu**

STUDI TERDAHULU	FOKUS PENELITIAN	KONTRIBUSI	PERSAMAAN	PERBEDAAN
<i>After Indonesia's Ratification : The ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution and Its Effectiveness As A Regional Environmental Governance Tool,</i> <b>Daniel Heilmann (2015)</b>	Kebijakan pemerintah Indonesia meratifikasi THPA dan Efektivitas THPA sebagai rezim Internasional di regional Asia Tenggara	Memberikan pemahaman terkait bagaimana kebijakan Indonesia dalam ratifikasi perjanjian Internasional yang dipengaruhi oleh tekanan sistem internasional.	Membahas kebijakan luar negeri Indonesia dalam meratifikasi perjanjian internasional	Fokus penelitiannya lebih banyak, konsep yang digunakan berbeda, perjanjian yang diratifikasi Indonesia juga berbeda.
<i>Indonesia's Democratic Politics and Foreign Policy-Making: A case study of Iranian Nuclear Issues 2007 – 2008</i> <b>Iisgindarsah (2012)</b>	Faktor determinan dari kebijakan luar negeri Indonesia yang memilih <i>abstain</i> dalam <i>voting</i> atas pemberian sanksi internasional kepada Iran oleh UN <i>Security Council</i> .	Tulisan ini membantu penulis dalam menggunakan konsep <i>determinant of foreign policy</i> kedalam sebuah kebijakan. Sehingga membantu penulis mengoperasionalisasikan konsep tersebut kedalam fenomena yang penulis ambil.	Konsep yang digunakan sama, yaitu <i>determinant of Foreign Policy</i> (William D. Coplin) Subyek penelitiannya sama yaitu Indonesia	Kebijakan yang diteliti berbeda, Iisgindarsah menggunakan kebijakan Indonesia yang memilih <i>abstain</i> dalam <i>voting</i> di UNSC. Sedangkan penulis meneliti kebijakan Indonesia terkait pembentukan CPOPC.

## 2.2 Konsep Kebijakan Luar Negeri

Kajian hubungan internasional membahas tentang interaksi antar negara dalam sistem Internasional. Interaksi antar negara ini merupakan hasil dari aktivitas aksi – reaksi yang dilakukan oleh negara – negara yang ada di dunia. Tindakan aksi – reaksi ini dimulai dari munculnya kebijakan yang kemudian mempengaruhi perilaku negara lain atau kebijakan tersebut berimbas terhadap negara lain. Kebijakan inilah yang kemudian disebut sebagai sebuah kebijakan luar negeri atau *Foreign Policy*.

James N. Rosenau mendefinisikan bahwa kebijakan luar negeri merupakan upaya suatu negara melalui keseluruhan sikap dan aktivitasnya untuk mengatasi serta mendapatkan untung yang sebesar – besarnya dari lingkungan eksternalnya.<sup>8</sup> Rosenau kemudian menambahkan bahwa, kebijakan luar negeri dibuat dengan tujuan untuk memelihara dan mempertahankan kelangsungan hidup suatu bangsa dalam sistem internasional.<sup>9</sup> Rosenau melihat bahwa faktor determinan dalam pembuatan kebijakan luar negeri adalah ideosinkretik yaitu sifat dari aktor pembuat kebijakan, peranan, pemerintah, masyarakat, dan faktor geografis.<sup>10</sup>

Definisi lain disampaikan oleh Valerie M. Hudson yang menjelaskan bahwa kebijakan luar negeri merupakan suatu strategi yang digunakan oleh pemerintah suatu negara untuk mencapai tujuan negara dalam hubungannya dengan entitas eksternal.<sup>11</sup> Termasuk memilih untuk tidak berbuat apapun atau *abstain*. Hudson mengenalkan *primary level of analysis in Foreign Policy*

---

<sup>8</sup> James N. Rosenau, "Pre-Theories and Theories of Foreign Policy." In R. B. Farrell, ed., *Approaches to Comparative and International Politics*. Evanston, Ill.: Northwestern University Press, 1966.

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> *Ibid*

<sup>11</sup> Valerie M. Hudson dalam Smith Steve dkk. *Foreign Policy: Theories, Actors, and Cases*. Oxford University Press. Page 12 -28

*Analysis* yang menjadi variabel utama dalam melihat proses pengambilan kebijakan luar yaitu meliputi; *Cognitive Processes, Leader Personality and Orientation, Small Group Dynamics, Interface of Leader Personality with Small Group Composition, Organization ProcessBureucratic Politics, Culture and Foreign Policy, Domestic Political Contestation, National Attribute and Foreign Policy dan System Effects on Foreign Policy*.<sup>12</sup>

Mengenalkan *primary level of analysis in Foreign Policy Analysis* tersebut, Hudson lebih menitikberatkan pembuatan kebijakan luar negeri suatu negara banyak dipengaruhi oleh politik dalam negerinya. Termasuk individu yang bertindak sebagai *decision-maker*. *Primary level of analysis* tersebut kemudian dapat diidentifikasi faktor dominan dalam pembentukan kebijakan luar negeri suatu negara.

Menurut William D. Coplin bahwa terdapat tiga tipe dari kebijakan luar negeri yang kemudian menjelaskan sifat dari politik luar negeri suatu negara.<sup>13</sup> Tipe pertama adalah keputusan yang sifatnya umum, yaitu yang cenderung untuk merespon masalah secara langsung.<sup>14</sup> Tipe kebijakan ini biasanya sedikit terburu – buru dalam pembuatannya, hal ini dikarenakan kebijakan ini mengacu pada diambilnya kebijakan yang implementasinya susah untuk diprediksi.

Kedua adalah tipe administratif, tipe yang kedua ini berkaitan dengan sistem pemerintahan suatu negara. Coplin menjelaskan bahwa tipe ini berkaitan

---

<sup>12</sup> *Ibid*

<sup>13</sup> William D. Coplin, Marsedes Marbur, 1992. Pengantar Politik Internasional: Suatu Telaah Teoritis. Edisi Kedua. Bandung: CV. Sinar Baru. Hal.32

<sup>14</sup> *Ibid*

dengan birokrasi suatu negara.<sup>15</sup> Dimana keputusan yang dibuat dirumuskan oleh aparatur negara yang bertugas menjalankan hubungan luar negeri, yaitu Kementerian Luar Negeri. Kemudian tipe terakhir adalah tipe krisis yang merupakan kombinasi dari kedua tipe sebelumnya. Pada tipe krisis terdapat kondisi atau situasi tertentu yang membuat *decision-maker* suatu negara harus segera mengeluarkan kebijakan tapi disisi lain kebijakan tersebut akan mempunyai dampak yang besar bagi negaranya dan juga hubungannya dengan negara lain.<sup>16</sup>

Bukunya yang berjudul *Intoduction to International Politics* berisi gambaran teori besar kebijakan luar negeri suatu negara. Kemudian didalamnya terdapat konsep – konsep yang mendukung teori kebijakan luar negeri itu sendiri.<sup>17</sup> Coplin menjelaskan bahwa kebijakan luar negeri merupakan hasil dari 3 (tiga) pertimbangan yang kemudian mempengaruhi *output* yaitu kebijakan luar negeri itu sendiri.<sup>18</sup> Pertama adalah kondisi politik dalam negeri yaitu perilaku *decision maker* dan juga *policy influencer*. Kedua adalah kondisi ekonomi dan militer suatu negara. Sedangkan yang ketiga adalah konteks internasional, dimana keadaan suatu negara yang telah menjadi tujuan kebijakan luar negeri dan pengaruh negara-negara lain yang relevan dengan masalah yang dihadapi.<sup>19</sup>

Proses pengambilan kebijakan menurut William D. Coplin dijelaskan seperti bagan berikut ini :

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hal 33

<sup>16</sup> *Ibid*, hal. 35

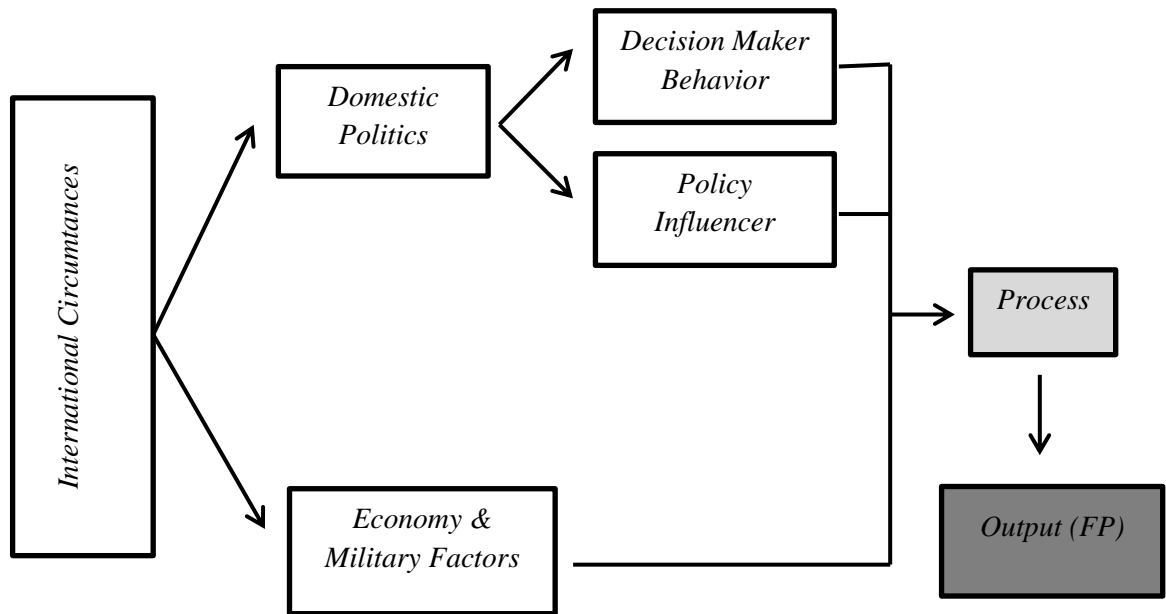
<sup>17</sup> William D. Coplin, 1980.*Introdution to International Politics*. New Jersey Prentice Hall. Hal. 92 - 101

<sup>18</sup> *Ibid*, hal 91

<sup>19</sup> *Ibid*, hal. 92 – 101



**Bagan 2.1 Decision Making Process on Foreign Policy**



(Sumber : Hasil Olahan Penulis dari William D. Coplin)

Berdasarkan bagan diatas dapat dilihat bahwa *international circumstances* dalam hal ini adalah kondisi internasional yang terdiri dari berbagai macam faktor akan merangsang atau mempengaruhi kondisi politik suatu negara dan juga kondisi ekonomi dan militer suatu negara sebelum akhirnya terjadi proses pembuatan kebijakan dan menghasilkan *output* yaitu kebijakan luar negeri tersebut. Coplin menjelaskan bahwa dalam kondisi politik domestik sendiri terdapat dua aktor yang kemudian memiliki citra atau respon tersendiri terhadap kondisi internasional. Kedua aktor tersebut digolongkan sebagai *decision maker* atau pembuat keputusan dan juga *policy influencer* yang terdiri dari *bureaucratic influencer*, *partisan influencer*, *interest influencer*, dan juga *mass influencer*.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> *Ibid*,

Penelitian penulis berfokus untuk melihat faktor kondisi Internasional yang mempengaruhi proses pembuatan kebijakan ratifikasi pembentukan CPOPC oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2015. Oleh karena itu penulis menggunakan *International Circumstances* dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri yang dituliskan oleh William D. Coplin. Penulis mengeliminasi variabel yang lain yaitu domestik politik serta faktor ekonomi dan militer. Justifikasi penulis hingga akhirnya menaikkan *international circumstances* menjadi sebuah konsep yang menjadi alat analisa penulis adalah sebagai berikut:

1. Konsep *factor determinant of foreign policy* milik Coplin memungkinkan variabelnya untuk berdiri sendiri sebagai sebuah konsep. Salah satu studi terdahulu yang dilakukan oleh penulis juga melakukan hal yang sama dengan hanya menggunakan *domestic politics*.
2. Menurut penulis 2 (dua) variabel yang ada yaitu *domestic politics* dan *economy and military factor* sifatnya sangat membicarakan politik dalam negeri suatu negara. Sehingga *international circumstances factor*-lah yang kemudian dekat dengan esensi kebijakan luar negerinya.
3. Jika berbicara fenomena yang diangkat penulis yaitu terkait penandatanganan CPOPC pada tahun 2015, yang lebih dominan adalah kondisi politik internasional saat Indonesia sedang menjadi sorotan internasional atas kebakaran hutan dan *palm oil sentiment policy* yang dikeluarkan Perancis. Sedangkan apabila dilihat dari *domestic politics factor*, kondisi internal Indonesia yang sedang dipimpin rezim baru

belum terlihat dinamikanya dalam menrumuskan suatu kebijakan luar negeri.

Faktor - faktor *international circumstances* yaitu konteks internasional atau kondisi internasional yang sedang terjadi yang kemudian berpengaruh terhadap pertimbangan dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri.<sup>21</sup> Konteks internasional ini sendiri merupakan hasil dari politik luar negeri seluruh negara baik pada masa lampu, masa sekarang, maupun menjadi alat prediksi tren kebijakan pada masa yang akan datang. Coplin menjelaskan bahwa terdapat 3 (tiga) variabel yang menjadi bagian dari kondisi Internasional yaitu:

1. *Geographic*

Variabel geografi berhubungan dengan kondisi fisik suatu negara yang dapat mempengaruhi sikap aktor internasional di lingkungan eksternalnya.<sup>22</sup> Untuk menjelaskan variabel geografi sendiri dapat menggunakan *geographical location* yang melihat jarak sebagai hal yang mempengaruhi sikap suatu negara memutuskan untuk bekerjasama atau berperang. Semakin dekat jarak secara geografisnya semakin besar peluang untuk menjalin kerjasama. Coplin mengacu pada analogi suatu negara akan cenderung bekerjasama dengan negara tetangganya yang memiliki kedekatan jarak secara geografi atau disebut sebagai *proximity*.<sup>23</sup> Selain itu, Coplin juga menjelaskan bahwa kondisi geografi akan mempengaruhi *priority* atas pembuatan kebijakan luar negeri suatu negara baik kecenderungan untuk beraliansi maupun kecenderungan untuk

---

<sup>21</sup> *Ibid*,

<sup>22</sup> *Ibid*, hal 190

<sup>23</sup> *Ibid*, hal 191

beraliansi dengan negara di kawasan yang berbeda.<sup>24</sup> Dalam bukunya Coplin memberikan pemahaman dalam studi kasus tendensi kebijakan luar negeri Amerika Serikat dan Rusia.

Indikator kedua yang digunakan untuk melihat variabel geografi adalah *distribution of natural resources*. Kepemilikan atas Sumber Daya Alam yang berbeda – beda antara negara satu dengan negara lain yang berbeda akan menciptakan atau membentuk pola interaksi internasional.<sup>25</sup> Sehingga kepemilikan atas sumber daya alam dan kebutuhan atas sumber daya negara lain yang kemudian dapat mempengaruhi sikap negara tersebut.

## 2. *Economic Relation*

Hubungan Ekonomi dalam *international cicumtances* jelas berbeda dengan faktor ekonomi dan domestik yang ada pada *economy & military factor* yang telah dijelaskan sebelumnya. Karena hubungan ekonomi yang dimaksud disini adalah adanya hubungan ekonomi dan politik internasional yang kemudian berdampak pada ekonomi domestik sehingga mempengaruhi kebijakan pemerintah suatu negara.

Hubungan ekonomi dapat dilihat dari ketergantungan internasional (*International interdependency*). Coplin menjelaskan bahwa interdependensi ekonomi menimbulkan dukungan serta tuntutan bagi *decision maker* sebuah negara untuk mengambil kebijakan politik luar

---

<sup>24</sup>

<sup>25</sup> *Ibid*, hal 192 - 193

negeri apa yang akan diambil.<sup>26</sup> Selain itu, hubungan ekonomi dapat pula dilihat dari *trade market* yang berkaitan dengan kondisi pasar global dan perdagangan internasional dan juga *the capital market* yang berhubungan dengan investasi dalam ekonomi global.<sup>27</sup>

### 3. Hubungan Politik

Coplin menyebutkan bahwa faktor politik internasional juga merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kecenderungan kebijakan luar negeri suatu negara. Hubungan politik ini bisa pola aliansi, perasaan kepentingan bersama, atau tekanan serta dukungan secara politis yang berpengaruh pada *branding* negara dan posisi strategis negara dalam politik internasional.<sup>28</sup> Sehingga kesamaan permasalahan atau isu yang sedang dialami suatu negara dengan negara yang lain juga dapat membentuk sikap yang berkaitan dengan hubungan politik itu sendiri.

## 2.3 Operasionalisasi Konsep

Penulis kemudian memfokuskan penelitian ini untuk melihat faktor dalam sistem Internasional yang mempengaruhi pembuatan kebijakan luar negeri. Menurut Coplin terdapat 3 (tiga) variabel dalam kondisi internasional yang dapat mempengaruhi pembuatan kebijakan luar negeri yang kemudian masing – masing indikatornya penulis operasionalisasikan dalam fenomena kebijakan pemerintah Indonesia dalam menandatangani kerjasama CPOPC pada tahun 2015.

---

<sup>26</sup> *Ibid*

<sup>27</sup> *Ibid*

<sup>28</sup> *Ibid*, hal 193

Untuk menjelaskan variabel pertama yaitu geografi, penulis menggunakan 2 (dua) indikator. Indikator yang pertama adalah letak geografi (*geographical location*) dan yang kedua adalah distribusi sumber daya alam (*distribution of natural resources*).<sup>29</sup> Indikator pertama memiliki parameter kedekatan jarak secara geografis. Dalam bukunya, Coplin menjelaskan bahwasanya kedekatan jarak negara (*proximity*) sangat berpengaruh dalam pembuatan kebijakan, terlebih keputusan untuk menjadi kawan atau lawan.<sup>30</sup> Kedekatan geografis dalam hal ini disesuaikan penulis dengan fenomena yang diangkat penulis, yaitu berkaitan dengan kedekatan secara kondisi fisik geografi sebagai negara tropis yang berada di lintang khatulistiwa, serta melihat bagaimana kedekatan atas akses laut yang menjadi jalur perdagangan negara – negara produsen kelapa sawit tersebut.

Selain itu, indikator geografis juga memiliki parameter prioritas (*priority*). Coplin menjelaskan bahwa kedekatan secara geografis menjadikan prioritas untuk menciptakan hubungan kerjasama dengan negara lain.<sup>31</sup> Seperti halnya Rusia karena kondisi geografis yang berdekatan dengan negara- negara tetangganya maka, Rusia memiliki prioritas untuk melakukan interaksi dengan negara tetangganya. Sehingga dengan parameter tersebut penulis mengoperasionalisasinya dengan menganalisis apakah kondisi geografis yang dimiliki negara produsen berpengaruh atas potensi Sumber Daya Alam yang dimilikinya sehingga penting untuk melihat sektor mana yang menjadi prioritas negara tersebut dengan mempertimbangkan kondisi internasionalnya.

Kemudian indikator yang kedua yaitu distribusi sumber daya alam (*distribution of natural resources*) memiliki parameter bahwa perbedaan

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hal 190

<sup>30</sup> *Ibid*.

<sup>31</sup> *Ibid*.

kepemilikan dan kebutuhan akan sumber daya alam antarnegara akan membentuk interaksi internasional.<sup>32</sup> Coplin memberikan contoh terkait kepemilikan akses air bersih suatu negara yang kemudian mempengaruhi kebijakan luar negerinya.<sup>33</sup> Oleh karena itu, terdapat 2 (dua) parameter yang digunakan untuk melihat indikator *distribution of national resources* ini. Yang pertama berhubungan dengan keterbatasan SDA disebabkan oleh perbedaan letak geografi yang kemudian membuat negara tersebut melakukan kebijakan impor dan kepada negara yang memiliki SDA yang dimaksud. Kemudian yang kedua adalah potensi SDA yang dimiliki negara serta kemampuan untuk mengelolanya juga menjadi faktor dalam pembuatan kebijakan luar negeri yang didasari oleh faktor geografis.

Kemudian penulis mengoperasionalisasinya bahwa keterbatasan SDA serta lahan yang tidak memungkinkan bagi negara importir kelapa sawit seperti India dan Pakistan dijadikan peluang oleh Indonesia dan Malaysia untuk membentuk CPOPC. Untuk mempermudah jalur perdagangan global atas CPO yang dimiliki oleh negara produsen CPO. Sedangkan parameter kedua difokuskan pada bagaimana Indonesia dan Malaysia memanfaatkan potensi SDA yang dimilikinya sehingga menandatangani kerjasama CPOPC.

Pada variabel kedua yaitu hubungan ekonomi terdapat 2 (dua) indikator yang digunakan sebagai alat analisa yaitu ketergantungan internasional (*international interdependency*) dan *The Trade Market*.<sup>34</sup> Pada variabel ini penulis mengeliminasi indikator *The Capital Market* karena tidak memiliki relevansi dengan isu dalam penelitian ini. Pada indikator ketergantungan internasional (*international interdependency*) penulis menganalisis bagaimana negara produsen

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hal 191

<sup>33</sup> *Ibid*

<sup>34</sup> *Ibid*, hal 193

membutuhkan negara importir untuk meningkatkan perekonomian begitu pula sebaliknya yaitu bagaimana negara importir membutuhkan negara produsen karena produk CPO merupakan salah satu produk penting bagi negara importir tersebut. Sehingga hubungan saling ketergantungan ini dijadikan negara produsen sebagai peluang untuk meningkatkan kerjasama antar negara produsen untuk memperkuat posisi mereka dalam perdagangan internasional.

Dalam indikator ini penulis memberikan contoh hubungan saling membutuhkan antara negara produsen dengan negara importir seperti Kolombia terhadap negara importir CPOnya. Serta bagaimana negara importir yaitu China bergantung atas CPO dari negara produsen seperti Indonesia.

Selanjutnya untuk melihat hubungan ekonomi (*economic relations*) penulis menggunakan indikator *trade market* yang berkaitan dengan *supply and demand* CPO mempengaruhi harga CPO di pasar global serta melihat posisi negara produsen dalam mekanisme pasar tersebut. Selanjutnya penulis menganalisis *trend of product CPO* yang mempengaruhi permintaan CPO secara khusus sehingga mempengaruhi perilaku negara konsumen dan negara produsen. Terakhir, penulis menganalisis bagaimana kerjasama perdagangan bebas pada sektor kelapa sawit terjalin sebelumnya dan CPOPC sebagai upaya penguatan kerjasama bilateral yang sudah terjadi tersebut.

Pada variabel ketiga yaitu *political relations* atau hubungan politik. Penulis berfokus pada *alliance agreement* dan juga *mutual problems or issues*. Dalam *alliance agreement* penulis melihat bagaimana kebijakan yang dikeluarkan sebelumnya oleh negara dapat mempengaruhi pembuatan kebijakan yang



selanjutnya.<sup>35</sup> Sehingga dioperasionisasikan melihat Kerjasama Indonesia dan Malaysia sebelum terbentuknya CPOPC di sektor kelapa sawit dan juga pengaruh atas kebijakan keluarnya Indonesia dari RSPO (*Rountable Sustainable Palm Oil*). Kemudian penulis juga melihat bagaimana tekanan maupun dukungan secara politis mempengaruhi Indonesia untuk menandatangani CPOPC.

Sedangkan pada indikator kedua yaitu *mutual problems or issues* dilihat kesamaan kepentingan antar negara produsen kelapa sawit serta kesamaan permasalahan atau isu yang dihadapi oleh negara produsen kelapa sawit dalam politik internasional. Hubungan politik (*Political Relations*) dijelaskan Coplin sebagai bentuk kegiatan aksi – reaksi yang menghasilkan sebuah kebijakan luar negeri. Hal ini dipengaruhi pula oleh isu atau masalah internasional yang kemudian berdampak pada politik Internasional.

Berikut adalah tabel operasionalisasi konsep untuk mempermudah memahami bagaimana kaitan antara fenomena dengan konsep yang digunakan penulis:

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hal 193

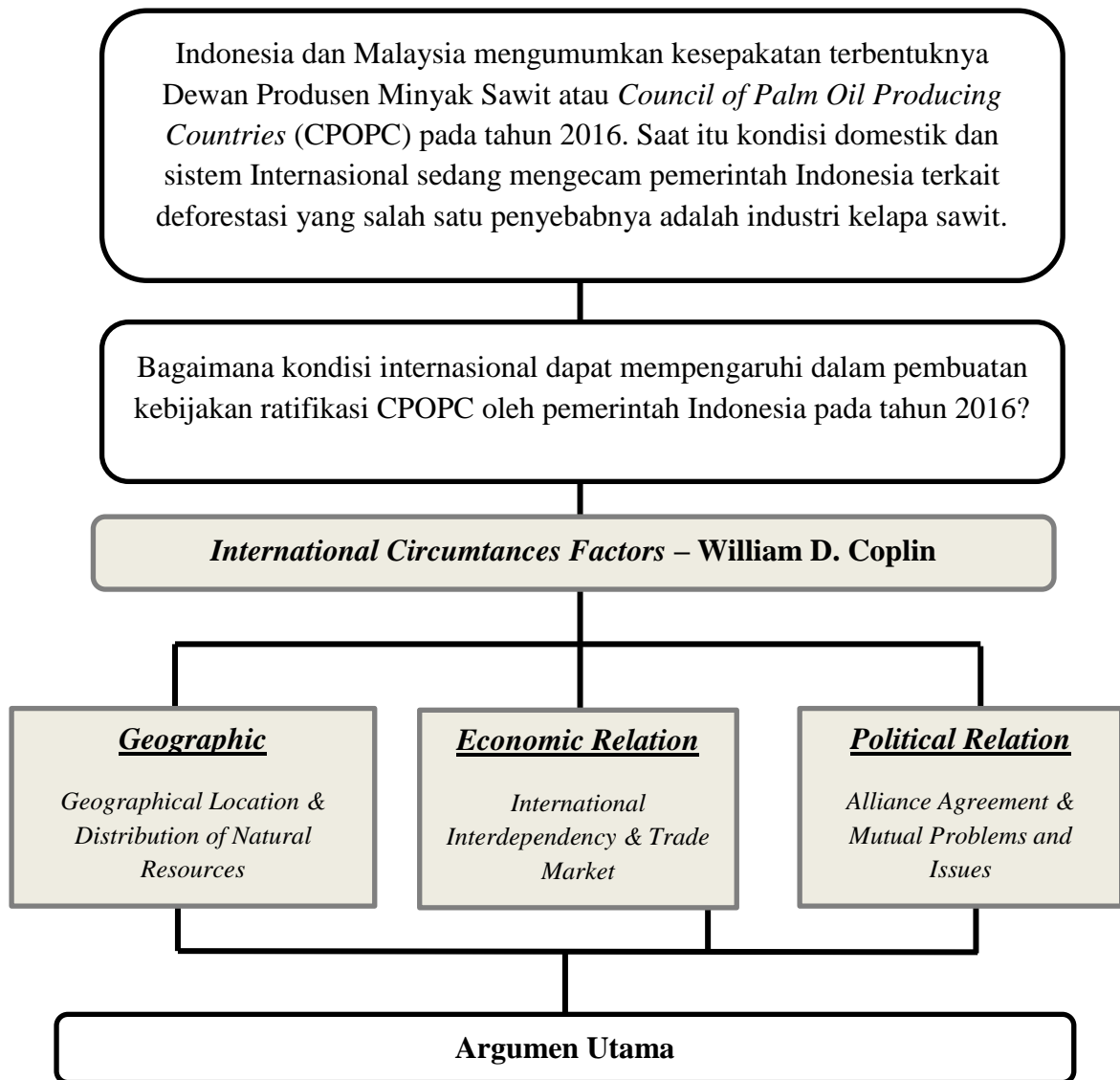
<b>Tabel 2.2 Operasionalisasi Konsep</b> <i>International Circumstances Factors</i>			
Variabel	Indikator	Parameter	Operasionalisasi
<i>Geographic</i>	<i>Geographical Location</i>	1. Semakin dekat jarak geografis antara dua negara atau lebih, kemungkinan terciptanya kebijakan untuk melakukan kerjasama akan semakin kuat.	1. Dekatnya jarak geografi antara Indonesia – Malaysia menjadi salah satu alasan yang dilihat dalam sikap Indonesia menandatangani kebijakan CPOPC.
		2. Letak geografis membentuk prioritas sebuah negara untuk menjalin hubungan kerjasama.	1. Letak geografis Indonesia dengan negara produsen kelapa sawit lainnya menjadikan CPO sebagai sektor prioritas untuk membentuk kerjasama.
	<i>Distribution of Natural Resources</i>	1. Keterbatasan SDA yang dimiliki suatu negara menjadi penyebab terjadinya hubungan kerjasama antar negara.	1. Negara importir kelapa sawit merupakan negara – negara yang tidak memiliki SDA atau kondisi geografis yang mendukung untuk budidaya kelapa sawit.
		2. Potensi SDA yang dimiliki oleh suatu negara akan mempengaruhi kebijakan negara tersebut dalam mengelola SDA-nya.	1. Kepemilikan potensi sumber daya alam yaitu kelapa sawit oleh Indonesia dan Malaysia sebagai produsen utama kelapa sawit global

<i>Economic Relations</i>	<i>International Interdependency</i>	1. Semakin besar pemanfaatan potensi SDA suatu negara akan berpengaruh pada peningkatan ekonomi negara tersebut.	1. Melihat bagaimana negara produsen memanfaatkan potensi SDA yang dimiliki untuk meningkatkan perekonomian negara.
		2. Tingkat ketergantungan sebuah negara terhadap suatu SDA negara lain akan berpengaruh kepada peningkatan jumlah permintaan SDA tersebut di pasar internasional.	1. Untuk melihat seberapa besar ketergantungan negara lain akan minyak kelapa sawit maka dilihat besarnya permintaan CPO dan konsumsi global CPO
	<i>The Trade Market</i>	1. Hubungan <i>supply</i> dan <i>demand</i> akan mempengaruhi harga suatu barang atau jasa dalam pasar global	1. Melihat bagaimana permintaan dan penawaran atas CPO mempengaruhi harga CPO di pasar global dan bagaimana posisi negara produsen dalam hal ini.
		2. <i>Trend of product</i> menciptakan dinamika dalam pasar global karena mempengaruhi permintaan atas suatu barang atau jasa.	1. Melihat bagaimana <i>trend</i> produk CPO dalam pasar global mempengaruhi permintaan atas CPO tersebut.
		3. Kebijakan perdagangan bebas ( <i>free trade policy</i> ) mempengaruhi hubungan ekonomi suatu negara dengan negara lain.	1. Melihat ada tidaknya kebijakan perdagangan bebas yang terjalin pada sektor kelapa sawit antara negara produsen dengan negara konsumen CPO.

<i>Political Relations</i>	<i>Alliance Agreements</i>	1. Kebijakan luar negeri yang telah dikeluarkan sebelumnya oleh suatu negara akan mempengaruhi pengambilan kebijakan luar negeri selanjutnya negara tersebut dalam isu yang sama.	1. Melihat bagaimana Kebijakan keluarnya Indonesia dari RSPO dapat mempengaruhi terbentuknya CPOPC.
		2. Kebijakan suatu negara juga akan dipengaruhi oleh tekanan dan dukungan untuk negara tersebut	1. Melihat ada tidaknya tekanan maupun dukungan dari negara lain yang kemudian mengarahkan Indonesia menandatangani CPOPC.
	<i>Mutual Problem or Issues</i>	1. Adanya kepentingan bersama akan memungkinkan negara untuk bekerja sama.	1. Melihat ada tidaknya kepentingan yang sama antar negara produse yang ingin dicapai sehingga Indonesia menandatangani CPOPC.
		2. Kesamaan permasalahan yang dialami beberapa negara dalam isu yang sama memungkinkan negara mengeluarkan kebijakan untuk kerjasama	2. Melihat ada tidaknya permasalahan yang dialami sesama negara produsen sehingga mempengaruhi kebijakan Indonesia terkait ratifikasi CPOPC.

## 2.4 Alur Pemikiran

Bagan 2.2 Alur Pemikiran



## 2.5 Argumen Utama

Argumen utama penulis dalam penelitian ini melihat bagaimana kondisi internasional yang mempengaruhi pemerintah Indonesia dalam pembuatan kebijakan adalah kondisi Hubungan Politik (*political relation*) yaitu terkait kesamaan masalah dan isu yang dihadapi oleh Indonesia dengan Malaysia dan negara produsen kelapa sawit lainya atas ancaman global yaitu terkait *palm oil centiment* oleh negara Uni Eropa yang kemudian mendorong Indonesia untuk membentuk CPOPC (*Council of Palm Oil Producing Countries*) untuk mengatasi permasalahan dan hambatan yang dialami oleh Indonesia sebagai negara produsen kelapa sawit.